

ABSTRAK

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, dimana tujuan dari pembuatan akta tersebut adalah sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Saat ini ada kecenderungan para pelaku tindak kejahatan dalam hal ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang memanfaatkan peranan dari Notaris dan PPAT dalam aksi mereka, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin pelaksanaan tugas dari jabatan Notaris dan PPAT. Dengan tidak dimasukkannya Notaris dan PPAT dalam kategori sebagai pihak pelapor dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang membuat tugas dan wewenang Notaris dan PPAT sangat rentan dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga perlunya kondisi demikian itu dirumuskan secara kongkrit dalam suatu Perundang-undangan.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Notaris dan PPAT, Tindak Pidana Pencucian Uang

ABSTRAK

the Notary and PPAT is a public official may be authorized by the state to create the authentic act, where the purpose of the deed is as evidence that the parties concerned have entered into an agreement, that what is written in the agreement is the goal and the wishes of the parties, that on a certain date unless specified otherwise the parties have entered into an agreement and that the agreement is in accordance with the will of the parties. Nowadays there is a tendency perpetrators of crimes in this case related to money laundering utilize the role of the Notary and PPAT in their actions, to the need for adequate legal protection to ensure the implementation of the tasks of the office of the Notary and PPAT. With the omission of the Notary and PPAT in the category as the complainant in the Act makes money laundering duties and authority of the Notary and PPAT very vulnerable exploited by perpetrators of money laundering so that the need for such a condition was formulated concretely in a legislation.

Keywords : Responsibility , Notary and PPAT , Money Laundering

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala rasa puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini penulis susun untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Strata 2 (S-2) Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan berupa pengarahan dan pembinaan dari para pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan hormat dan ucapan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E.,M.T., Ak., selaku Rektor Universitas Airlangga Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus Universitas Airlangga Surabaya;
2. Bapak Prof. Dr. Muchammad. Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, yang juga telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di kampus Universitas Airlangga Surabaya;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
4. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan, dan ilmu pengetahuannya, serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis;
5. Bapak/Ibu Panitia tim penguji tesis yang telah memberikan pengarahan dan perbaikan atas penyusunan tesis ini;
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan

banyak ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat memperdalam ilmu hukum khususnya di bidang Kenotariatan;

7. Seluruh Staf dan Karyawan Program Studi Magister Kenotariatan Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang telah membantu kelancaran dalam proses belajar dalam perkuliahan selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Airlangga;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Seger Hariyanto dan Ibu Sri Indriyah terima kasih atas segala doa, cinta, dukungan dan pengorbanannya yang tiada henti kepada penulis;
9. Buat rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik pada saat perkuliahan maupun dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya atas segala keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, dengan kerendahan hati, penulis siap untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan penulisan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Surabaya,

Penulis,

Mike Erviana, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Subekti.R dan R. Tjitrosudibio, *Burgelijk Wetboek (BW)*, Pradnya Paramita.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5146 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| ABSTRAKSI | iv |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 2. Rumusan Masalah | 11 |
| 3. Tujuan Penelitian | 12 |
| 4. Manfaat Penelitian | 12 |
| 5. Kerangka Teoritik | 13 |
| 6. Metode Penelitian | 22 |
| 7. Sistematika Penulisan | 24 |
| BAB II. NOTARIS DAN PPAT DALAM TRANSAKSI PROPERTI YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | |
| 1. Teori Pertanggungjawaban | 26 |
| 2. Tanggung Jawab Notaris dan PPAT terhadap akta yang dibuat | 28 |
| 3. Relevansi transaksi properti melalui iNotaris dan PPAT dengan Tindak Pidana Pencucian Uang | 52 |
| BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN PPAT DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DALAM PRAKTEK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG | |
| 1. Tindak pidana penyertaan Notaris dan PPAT pada Tindak pidana pencucian uang | 68 |
| 2. Alasan meniadakan hukuman pidana (alasan pembenar) | 82 |
| 3. Perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT berdasarkan UUJN 92 | 91 |

BAB IV. PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| 1. Kesimpulan | 97 |
| 2. Saran..... | 103 |

DAFTAR BACAAN

